
PRESS RELEASE
NO: 008/03/2021

TASPEN TEKEN KERJA SAMA DENGAN KPK PERKUAT *WHISTLE-BLOWING SYSTEM*

Jakarta (03/03/2021) – Pada hari ini, Selasa 2 Maret 2021, PT TASPEN (Persero) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Program ini merupakan upaya pencegahan dalam rangka pemberantasan korupsi bisa berjalan di lingkungan BUMN.

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direktur Utama PT TASPEN (Persero) A.N.S Kosasih dengan Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Hadiyana serta disaksikan Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo di gedung Merah Putih KPK.

A.N.S Kosasih menjelaskan, perjanjian kerja sama ini untuk membantu TASPEN dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan masyarakat yang telah diterapkan dan dikembangkan layanan pengaduan online melalui *whistleblowing system* (WBS) di website TASPEN dan nantinya akan terintegrasi dengan KPK.

“PT TASPEN (Persero) dan KPK akan mengintegrasikan *whistleblowing system* secara elektronik, memperkuat sistem pengaduan pelanggaran yang sudah dimiliki TASPEN. Integrasi sistem ini akan memudahkan koordinasi dan monitoring guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan dugaan pelanggaran,” ujar A.N.S Kosasih.

Selanjutnya menteri BUMN menyampaikan bahwa Kementerian BUMN berkomitmen melakukan transformasi, transparansi dan profesionalisme di lingkungan kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN. Oleh karena itu Kementerian BUMN terus mendorong perusahaan BUMN untuk menandatangani kerja sama *whistleblowing system* (WBS) dengan KPK.

“Alhamdulillah hari ini ada 27 perusahaan BUMN yang menandatangani kerjasama. Target kami seluruh BUMN yang ada dibawah klaster harus ikut program ini seperti kesepakatan Kementerian BUMN dengan KPK. Saya berharap hubungan kerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN bisa berjalan dengan baik sebagai mitra yang baik sehingga BUMN bisa berjalan dengan sehat,” Kata Erick dalam sambutannya pada acara penandatanganan kerja sama.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPK memberikan apresiasi kepada jajaran direksi BUMN yang telah menjalankan 2 Program KPK dalam rangka memberantas korupsi yaitu program Sistem Manajemen Anti Suap (ISO 37001:2016) dan Pembangun Unit Pengelola Gratifikasi.

“Antara BUMN dan KPK memiliki kewajiban dan peran tugas pokok yang sama yaitu mencegah kerugian negara, menyelamatkan keuangan negara dan meningkatkan pendapatan negara. Sangat tepat hari ini KPK bersama jajaran BUMN melaksanakan Perjanjian Kerja Sama untuk melakukan pencegahan korupsi, membangkitkan semangat untuk tidak melakukan korupsi dan sebagai bagian anak bangsa untuk membangun budaya anti korupsi. Semoga Sistem WBS ini berdaya guna dan berhasil guna,” jelas Firli Bahuri.

PT TASPEN (Persero) sendiri mendapatkan sertifikasi ISO 37001 : 2016 pada tahun 2020 setelah dilakukannya penilaian/assessment oleh lembaga British Standards Institution (BSI). Melalui sertifikasi ini menunjukkan bahwa TASPEN telah memiliki sistem untuk mencegah adanya penyuapan dan menegakkan 4 NO yaitu *No Bribery, No Gift, No Kickback dan No Luxurious Goods*.

Layanan *whistleblowing system* dan Sistem Manajemen Anti Suap menjadi alat kepatuhan bagi TASPEN untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG). Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh TASPEN dalam mengimplementasikan GCG, TASPEN memperoleh penghargaan sebagai *The Most Trusted Companies* dalam *Good Corporate Governance Award 2020*.

“Penghargaan *The Most Trusted Companies* yang diraih TASPEN menjadi penyemangat bagi TASPEN untuk selalu meningkatkan dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta selalu memperkuat upaya-upaya pencegahan praktik korupsi,” tutup Kosasih.

Jakarta, 3 Maret 2021

Plt. SVP Sekretaris Perusahaan,

Henra